

**ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH,
RETRIBUSI DAERAH, DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**

(Studi Pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah)



PUBLIKASI ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

DHYNI INKA SYAFITRI

B 200 120 256

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH,
RETRIBUSI DAERAH, DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**
(Studi Pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah)

PUBLIKASI ILMIAH


Oleh:

DHYNI INKA SYAFITRI

B 200 120 256

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing


Dra. Mujiyati, M.Si
NIK. 586

HALAMAN PENGESAHAN




ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah)

Oleh:

DHYNI INKA SYAFITRI
B 200 120 256

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 30 Januari 2016
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Dra. Mujiyati, M.Si
(Ketua Dewan Penguji) (.....)
2. Dra. Nursiam, MH, Ak
(Anggota I Dewan Penguji) (.....)
3. Drs. M. Abdul Aris, M.Si
(Anggota II Dewan Penguji) (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Triyono, SE., M.Si
NIK. 642



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Telp (0271) 717417 Surakarta – 57102

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DHYNI INKA SYAFITRI
NIRM : 11.6.106.12030.50256
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Naskah Publikasi : ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK
DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN LAIN-LAIN PAD
YANG SAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah publikasi yang saya buat dan serahkan ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti dan atau dapat dibuktikan bahwa naskah publikasi hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan atau gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.

Surakarta, 19 April 2016

Yang Membuat Pernyataan

(DHYNI INKA SYAFITRI)

**Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan
Lain-Lain PAD Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
(Studi Pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah. pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menghitung rasio efektivitas, rasio tingkat pertumbuhan dan rasio kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan rasio efektivitas rata-rata pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah sangat efektif karena selama tiga tahun pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah memiliki tingkat efektivitas lebih dari 100%. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat pertumbuhan, rata-rata pertumbuhan pajak daerah tahun 2011-2013 menunjukkan rata-rata 45,73% dengan kriteria kurang berhasil, rata-rata pertumbuhan retribusi daerah sebesar -3,53 dengan kriteria tidak berhasil, dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 38,53% dengan kriteria kurang berhasil. Kemudian kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah rata-rata 32,89% dengan kriteria sedang, kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah rata-rata 23,51% dengan kriteria cukup, dan kontribusi Lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah rata-rata 39,28% dengan kriteria sedang.

Kata kunci: Pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, efektivitas, pertumbuhan, kontribusi, dan pendapatan asli daerah

ABSTRACT

This study aims to determine the level of growth and the contribution of local taxes, levies, and other legitimate PAD on revenue. Data collection is done by the method of documentation. The analytical method used in this research is quantitative descriptive analysis method by calculating the effectiveness ratio, the ratio of the growth rate and the ratio of contribution of local taxes, levies, and other legitimate PAD.

The results showed Based effectiveness ratio of the average tax, retribution, and other legitimate PAD highly effective for three years local taxes, levies, and other legitimate PAD has the effectiveness of more than 100%. Based on the results of the calculation of growth rates, the average growth of local taxes in 2011-2013 showed an average of 45.73% with less success criteria, the average growth of -3.53 levies with no success criteria, and Other PAD authorized by 38.53% with less success criteria. Then the local tax contributions to local revenue on average 32.89% with moderate criteria, contribution levies on revenue an average of 23.51% with sufficient criteria, and contributions Other legitimate PAD by revenue on average 39.28% with moderate criteria.

Keywords: local taxes, levies, other legitimate PAD, effectiveness, growth, contribution, and local revenues

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pelimpahan dan penyerahan wewenang serta tugas dan urusan pemerintahan pusat kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan peraturan, Realisasi pelaksanaan otonomi daerah memerlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Suwarno, 2008).

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri (Wahyuni: 2009). Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20% (Kuncoro, 2007:2).

Jawa tengah sebagai salah satu provinsi yang diberi hak otonomi atas daerahnya masing-masing untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa tengah dan warganya diharapkan mampu bekerjasama dalam mengelola dan memaksimalkan potensi sumber ekonomi untuk memaksimalkan pendapatan daerahnya. Potensi yang dapat dimaksimalkan oleh daerah-daerah di Jawa tengah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah Pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Dengan dilatar belakangi hal tersebut peneliti tertarik untuk mereplikasi penelitian wahyuni (2009) mengenai analisis pertumbuhan dan kontribusi dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah pada kabupaten/kota se Jawa-Bali, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Wahyuni yaitu peneliti menggunakan obyek penelitian yang berbeda yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah selain itu peneliti hanya meneliti kabupaten dan kota yang ada di provinsi Jawa Tengah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.

B. LANDASAN TEORI

1. Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 angka (6) tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Penerimaan Daerah

Yang dimaksud penerimaan daerah menurut undang-undang No. 33 tahun 2004 Pasal 1 angka (11) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Di dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 pasal 5 juga menyebutkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan sedangkan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

3. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pajak Daerah

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Retribusi Daerah

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

6. Lain-lain PAD yang sah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Bagian ketiga pasal 26 (4) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

7. Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

- a. Intensifikasi adalah Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti.

- b. Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru, namun dalam rangka ekstensifikasi ini khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pokok nasional.

C. METODE ANALISIS DATA

1. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah direktorat jenderal perimbangan keuangan (DJPK). Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari laporan realisasi dan target pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran, terutama mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah yang bersumber dari direktorat jenderal perimbangan keuangan (DJPK) Provinsi Jawa tengah.

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari informasi keuangan yang dipublikasikan dan bersumber dari direktorat jenderal perimbangan keuangan (DJPK) dalam kurun waktu 4 tahun yaitu tahun 2010-2013 berupa laporan realisasi anggaran (LRA), buku literature yang berkaitan dengan penelitian, peraturan perundang-undangan, serta gambaran umum mengenai provinsi Jawa tengah.

4. Metoda Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu analisis deskriptif dengan metode kuantitatif dengan menghitung efektivitas, laju pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Langkah-langkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Menghitung rasio efektifitas pajak daerah, retribusi daerah, dan Lain-lain PAD yang sah

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD maupun komponen-komponen PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Putri: 2011).

$$\text{Efektifitas}_{\text{pd}} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Efektifitas}_{\text{rd}} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Efektifitas}_{\text{llpads}} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang sah}}{\text{Target Penerimaan Lain-lain PAD yang sah}} \times 100\%$$

Keterangan:

$\text{Efektifitas}_{\text{pd}}$: adalah Efektifitas pajak daerah

$\text{Efektifitas}_{\text{rd}}$: adalah Efektifitas Retribusi Daerah

$\text{Efektifitas}_{\text{llpads}}$: adalah Efektifitas Lain-lain PAD yang sah

Terdapat kriteria untuk menentukan apakah pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah dapat dikatakan efektif, kriteria tersebut diantaranya adalah:

Kriteria Efektifitas

Efektifitas	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mujiyati, 2014

- b. Menghitung tingkat pertumbuhan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah

Menurut Halim (2004 : 163) Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya, rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan adalah:

$$G_x = \frac{X_{(t-1)}}{X_t - X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

G_x = tingkat pertumbuhan masing-masing jenis penerimaan daerah

X_t = realisasi penerimaan masing-masing jenis penerimaan daerah pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$ = realisasi penerimaan masing-masing jenis penerimaan daerah pada tahun sebelumnya.

Kriteria Laju Pertumbuhan

Presentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Halim (2007: 291)

- c. Menghitung Kontribusi Pajak Daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah

Menurut Halim (2001) kontribusi daerah adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah

$$Y = \frac{RPD}{RPAD} \times 100\%$$

$$Y = \frac{RRD}{RPAD} \times 100\%$$

$$Y = \frac{LLPADS}{RPAD} \times 100\%$$

Keterangan

- Y = Prosentase Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang sah
 RPD = Realisasi Pajak Daerah
 RRD = Realisasi Retribusi Daerah
 LLPADS = Realisasi Lain-lain PAD yang sah
 RPAD = Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Kriteria Kontribusi

Presentase Kontribusi	Kriteria
≥ 50	Sangat Baik
40-50	Baik
30-40	Sedang
20-30	Cukup
10-20	Kurang
≤ 10	Sangat Kurang

Sumber: Halim (2004:163)

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah kabupaten/kota mulai melakukan penyesuaian terhadap beberapa komponen pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pada komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Hal tersebut tercermin dari munculnya undang-undang dan peraturan baru mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Seperti undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang memasukkan dua jenis pajak pusat yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sector Pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah.

Pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian penerimaan pendapatan asli daerahnya. Hal tersebut tercermin dalam target penerimaan pendapatan asli daerah yang terus mengalami peningkatan selama periode 2010-2013. Target penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2010 sebesar Rp.76.470.000.000 hingga tahun 2013 terus mengalami peningkatan mencapai jumlah Rp.134.917.000.000. Pendapatan asli daerah terutama diharapkan akan terpenuhi dari sector pajak daerah dan retribusi daerah karena penerimaannya dipungut langsung dari masyarakat, tidak hanya itu sector lain-lain PAD yang sah juga diharapkan akan membantu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah karena memiliki realisasi yang cukup besar.

Bila dilihat dari realisasinya rata-rata Realisasi pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa tengah pada tahun 2010-2013 terus mengalami peningkatan. Realisasi PAD pada tahun 2010 mencapai jumlah Rp 84.519.000.000 hingga tahun 2013 terus mengalami peningkatan mencapai jumlah Rp.174.024.000.000. Semenjak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang lebih luas dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah daerah dimana pelaksanaannya paling lambat 1 Januari 2014.

1. Menghitung rasio efektivitas pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa tengah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang dihitung dengan melakukan perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim: 2002).

Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2013

Tahun Anggaran	Efektifitas Pajak Daerah (%)	Kriteria	Efektifitas Retribusi Daerah (%)	Kriteria	Efektifitas Lain-lain PAD sah (%)	Kriteria
2010	113,09%	Sangat Efektif	102,55%	Sangat Efektif	118,85%	Sangat Efektif
2011	124,45%	Sangat Efektif	102,15%	Sangat Efektif	113,84%	Sangat Efektif
2012	128,07%	Sangat Efektif	106,16%	Sangat Efektif	135,62%	Sangat Efektif
2013	131,99%	Sangat Efektif	111,66%	Sangat Efektif	135,58%	Sangat Efektif
Rata-rata	124,34%		106,03%		126,46%	

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Data diolah 2016

Tabel diatas menjelaskan efektifitas pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2013 terus mengalami peningkatan. Tahun 2010-2013 efektifitas pajak daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa tengah terus mengalami peningkatan secara berurutan yakni sebesar 113,09%, 124,45%, 128,07%, 134,55% dan pada katagori sangat efektif. Untuk retribusi daerah pada tahun 2010-2013 efektifitas retribusi daerah kabupaten/kota di provinsi jawa tengah terus mengalami peningkatan secara berurutan yakni sebesar 102,55%, 102,15%, 106,16%, 111,66% dan pada katagori sangat efektif. Sedangkan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2010-2013 memiliki tingkat efektivitas sebesar 118,85%, 113,84%, 135,62%, 135,58% dan berada pada katagori sangat efektif.

2. Menghitung Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang sah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Tingkat pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Halim: 2001).

Analisis Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah
pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2013

Tahun Anggaran	Pertumbuhan Pajak Daerah (%)	Kriteria	Pertumbuhan Retribusi Daerah (%)	Kriteria	Pertumbuhan Lain-lain PAD sah (%)	Kriteria
2010	-	-	-	-	-	-
2011	60,92%	Cukup Berhasil	-6,55%	Tidak Berhasil	35,82%	Kurang Berhasil
2012	35,73%	Kurang Berhasil	-15,98%	Tidak Berhasil	60,61%	Cukup Berhasil
2013	40,53%	Kurang Berhasil	11,95%	Tidak Berhasil	19,17%	Tidak Berhasil
Rata-rata	45,73%		-3,53%		38,53%	

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), Data diolah 2016

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa tengah mengalami pertumbuhan naik turun dengan rata-rata mencapai 45,73%. Pada tahun 2011 pertumbuhan pajak daerah mencapai 60,92% dengan kriteria Cukup berhasil, pada tahun 2012 pajak daerah mengalami penurunan hingga mencapai 35,73% dengan kriteria kurang berhasil. Pertumbuhan kembali meningkat pada tahun 2013 yaitu mencapai 40,53% dengan kriteria kurang berhasil. Kondisi ini dapat dijadikan pertimbangan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah di kabupaten/kota di provinsi Jawa tengah supaya lebih optimal sehingga penerimaan pajak daerah akan semakin meningkat. Sementara itu retribusi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa tengah mengalami pertumbuhan naik turun dan cenderung negatif dengan rata-rata mencapai -3,53%. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah. Pada tahun 2011 pertumbuhan retribusi daerah mengalami pertumbuhan yang negative yaitu sebesar -2,42% atau dengan kriteria tidak berhasil. Pada tahun 2012 retribusi daerah mengalami penurunan hingga mencapai -15,98% dengan kriteria tidak berhasil, pertumbuhan terjadi pada tahun 2013 yaitu mencapai 11,95%. Melihat kondisi tersebut pemerintah daerah diharapkan untuk mengoptimalkan retribusi daerah karena retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat dioptimalkan. Sedangkan tingkat pertumbuhan lain-lain PAD yang sah kabupaten/kota di Provinsi Jawa tengah mengalami pertumbuhan naik turun dengan rata-rata mencapai 38,53%. Pada tahun 2011 pertumbuhan lain-lain PAD yang sah daerah mengalami pertumbuhan sebesar 35,82% Pada tahun 2012 mengalami peningkatan pertumbuhan hingga mencapai 60,61% , pada tahun 2013 mengalami penurunan yaitu mencapai 19,17%. Lain-lain PAD yang sah selalu

menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif namun memiliki angka yang positif, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan lain-lain PAD yang sah selalu meningkat.

3. Menghitung Rasio Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang sah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Agar penerimaan pendapatan asli daerah dapat optimal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah maka diperlukan analisis dan perhitungan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel diatas menjelaskan tingkat kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2010 – 2013. Pajak daerah memiliki rata –rata kontribusi selama 4 tahun adalah sebesar 32,89%. Pada tahun 2010-2013 secara berurutan kontribusi pajak daerah yaitu sebesar 25,83%, 32,98%, 34,23%, dan 38,51%. Semenjak diberlakukannya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah penambahan jenis pajak seharusnya mampu meningkatkan Pendapatan Asli

Analisis Rasio Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2013

Tahun Anggaran	Kontribusi Pajak Daerah (%)	Kriteria	Kontribusi Retribusi Daerah (%)	Kriteria	Kontribusi Lain-lain PAD sah (%)	Kriteria
2010	25,83%	Sedang	35,56%	Sedang	33,64%	Sedang
2011	32,98%	Sedang	26,36%	Cukup	36,25%	Sedang
2012	34,23%	Sedang	16,94%	Kurang	44,52%	Baik
2013	38,51%	Sedang	15,18%	Kurang	42,47%	Baik
Rata-rata	32,89%		23,51%		39,22%	

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Data diolah 2016

Daerah. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2010 – 2013 dengan rata –rata kontribusi selama tiga periode adalah sebesar 23,51%. Pada tahun 2010-2013 secara berurutan kontribusi retribusi daerah yaitu sebesar 35,56%, 26,36%, 16,94%, dan 15,18%. Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kecil bila dibandingkan dengan pajak daerah. Pemerintah dalam hal ini diharapkan untuk terus melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari retribusi daerah. Sedangkan kontribusi Lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah selama tahun

2010 – 2013 dengan rata –rata kontribusi selama empat periode adalah sebesar 39,22%. Pada tahun 2010-2013 secara berurutan kontribusi lain-lain PAD yang sah yaitu sebesar 33,64%, 36,25%, 44,52%, dan 42,47%. Pemerintah diharapkan dapat mengelola asset daerahnya sehingga sumber penerimaan yang berasal dari elemen lain-lain PAD yang sah dapat optimal.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat diketahui bahwa:

- a. Berdasarkan rasio efektivitas, rata-rata efektivitas pajak daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah sebesar 124,34%, retribusi daerah sebesar 106,03% dan lain-lain PAD yang sah sebesar 126,46 % hal ini menunjukkan rata-rata pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah sangat efektif karena selama tiga tahun pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah memiliki tingkat efektivitas lebih dari 100%.
- b. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat pertumbuhan, tingkat pertumbuhan pajak daerah pada tahun 2011-2013 secara berurutan adalah sebesar 60,92%, 35,73%, dan 40,53%. Walaupun pajak daerah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif tetapi selalu memiliki angka yang positif, hal ini menunjukkan penerimaan pajak daerah yang selalu meningkat. Untuk pertumbuhan retribusi daerah pada tahun 2011-2013 secara berurutan yaitu sebesar -6,55%, -15,98% dan 11,95% dan berada pada kriteria tidak berhasil. Pertumbuhan retribusi daerah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif namun cenderung negatif hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah. Pertumbuhan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2011-2013 secara berurutan yaitu sebesar 35,82%, 60,61%, dan 19,17%. Lain-lain PAD yang sah selalu menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif namun memiliki angka yang positif, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan lain-lain PAD yang sah selalu meningkat.
- c. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2010 sebesar 25,83%, tahun 2011 sebesar 32,98%, tahun 2012 sebesar 34,23% dan pada tahun 2013 sebesar 38,51% kontribusi pajak daerah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya hal ini disebabkan karena terdapat penambahan jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah yang sebelumnya merupakan kewenangan pusat. Kontribusi retribusi daerah pada tahun 2010 sebesar 35,56%, tahun 2011 sebesar 26,36%, tahun 2012 sebesar 16,94%, dan pada tahun 2013 sebesar 15,18% dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kecil. Sementara kontribusi lain-lain PAD yang sah pada tahun 2010 sebesar 33,64%,

tahun 2011 sebesar 36,25%, tahun 2012 sebesar 44,52%, dan pada tahun 2013 sebesar 42,47%.

2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa keterbatasan, yaitu:

- a. Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam penelitiannya, diantaranya penelitian ini terbatas pada waktu penelitian yaitu hanya 4 tahun saja periode 2010-2013.
- b. Wilayah yang reatif terbatas yaitu hanya pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan pada data serupa dan wilayah lainnya yang lebih luas yang diterbitkan pada periode yang lain. Oleh karena itu, model penelitian ini perlu direplikasi dengan data, wilayah penelitian, dan periode yang berbeda sehingga dapat diperoleh informasi yang dapat mendukung atau memperbaiki hasil penelitian.

3. Saran

Berdasarkan simpulan di atas serta adanya keterbatasan dalam penelitian, dikarenakan penelitian menggunakan data pada periode yang relatif pendek yaitu tahun 2010 sampai 2013 serta wilayah yang relatif terbatas yaitu hanya pada kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan pada data serupa dan wilayah lainnya yang lebih luas misalnya seluruh pulau jawa yang diterbitkan pada periode yang lain. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas karena hasil yang diperoleh bisa saja berbeda. Agar penelitian ini bisa menjadi lebih baik, penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dalam kurun waktu lebih dari 4 tahun.

F. DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2010, *Laporan Realisasi Anggaran*.
www.djpk.go.id

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2011, *Laporan Realisasi Anggaran*.
www.djpk.go.id

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2012, *Laporan Realisasi Anggaran*.
www.djpk.go.id

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2013, *Laporan Realisasi Anggaran*.
www.djpk.go.id

Halim, Abdul. (2001). *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan percetakan (UPP) AMP YKPN.

Halim, Abdul. (2014). *Manajemen Ke²⁰.....n Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan

- Pengaruhnya terhadap Pendapatan Daerah. Laporan Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi 2013. www.bappenas.go.id
- Kuncoro, Haryo. 2007. Fenomena *Flypaper Effect* pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X Lembaga Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang *Pemerintah Daerah*
- Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- Mujiyati, Lina Ayu Safitri, dan Della Kusuma Putri. 2014. Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pasca UU No. 28 Tahun 2009 Tentang PDRD (Studi kasus Kabupaten Sukoharjo). *Seminar Nasional dan Call for Syariah Paper*.
- Putry, Nurrahman dan Abdullah. (2011). Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi, 1, No. 3*.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Suratman, Eddy, Candra Fajri Ananda, Hamid Paddu, dan Artidiatun Adji. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah. Laporan Tim Asistensi Kementerian Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal 2013
- Suwarno, Agus Endro dan Suhartiningsih. 2008. Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Wahyuni, dan Priyo Hari Adi. 2009. Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah. *The 3rd National Conference UKWMS*. Surabaya, 10 Oktober 2009.